

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penangguhan penahanan dan juga politik hukum pidana terhadap penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana dimasa yang akan datang. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penangguhan penahanan dan bagaimana politik hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana. Penulis menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder, dan metode pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan penangguhan penahanan belum diatur secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan adanya aturan turunan atau tambahan mengenai penangguhan penahan tersebut. Pengaturan mengenai penangguhan penahanan perlu dikaji ulang dan ditinjau kembali untuk menciptakan kepastian hukum di masyarakat.

Kata Kunci: *Penangguhan Penahanan, Pelaku Tindak Pidana, KUHAP.*

ABSTRACT

This study aims to determine the regulation of the suspension of detention and also the criminal law policy regarding the suspension of detention of perpetrators of murder based on the Criminal Procedure Code in the future. The main problem of this study is how to regulate the suspension of detention and how the criminal law policy is for perpetrators of murder based on the Criminal Procedure Code. The author uses a normative research method, using a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used in this study are primary and secondary, and the method of processing legal materials is carried out by collecting, selecting and classifying. The results of this study indicate that the regulation of the suspension of detention has not been clearly regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP), but there are derivative or additional rules regarding the suspension of detention. Regulations regarding the suspension of detention need to be reviewed and reviewed to create legal certainty in society.

Keywords: *Suspended Detention, Criminal Act, Criminal Procedure Code.*